

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES
PUBLISHED BY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article.....	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 27 No. 4 (2026): October
DOI: 10.21070/ijins.v27i4.2215

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

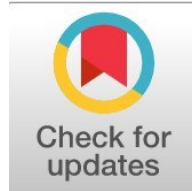
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

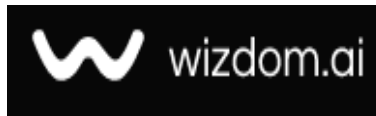
How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Integrated Water Capitalization Governance Underpins Village Autonomy : Tata Kelola Kapitalisasi Air Terpadu Menjadi Landasan Otonomi Desa

Rosaria Oktaviani, rsroktaviani@gmail.com (*)

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia

Gregorius Sahdan, rsroktaviani@gmail.com

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Village autonomy depends on the capacity of local governments to convert natural assets into sustainable economic, social, and institutional value. **Specific Background:** Despite abundant springs, Ponggok previously experienced high poverty because its water resources were primarily used for domestic and agricultural purposes without organized productive management. **Knowledge Gap:** Limited research integrates governing perspectives, common-pool resource theory, and water capitalization to explain how collective natural assets support multidimensional village autonomy. **Aims:** This study analyzes the governance process of water resource capitalization and its contribution to economic, social, and administrative independence. **Results:** A descriptive qualitative design employed in-depth interviews, participatory observation, documentary analysis, and source, technique, and time triangulation. Capitalization began with a leadership-driven paradigm shift and the establishment of BUMDes Tirta Mandiri, supported by Pokdarwis Wanua Tirta, academic collaboration, private-sector partnerships, and active community participation. Water resources were diversified into tourism, agriculture, fisheries, and commercial partnerships. In 2025, Umbul Besuki generated Rp2.80 billion and Umbul Sigedang-Kapilaler generated Rp3.335 billion, while PT T contributed Rp1.196 billion to Village Original Revenue. These activities created employment, expanded local enterprises, reduced outward labor migration, and strengthened professional village institutions. **Novelty:** The study integrates collective-resource governance, institutional capitalization, and three dimensions of autonomy within one village-based framework. **Implications:** Sustainable local development requires visionary leadership, responsive institutions, equitable benefit distribution, inclusive participation, strategic partnerships, and continuous ecological protection.

Highlights:

- BUMDes, tourism groups, universities, businesses, and residents formed a coordinated management structure.
- Two tourism units generated combined revenue exceeding Rp6.13 billion during 2025.
- Product diversification created local employment, supported household enterprises, and reduced labor migration.

Keywords: Governing, Water Resource Capitalization, Village Autonomy, Common-Pool Resources

Published date: 2026-08-05

Pendahuluan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua telah membawa perubahan fundamental dalam relasi antara desa dan negara. Desa tidak lagi diposisikan sebagai subordinat pemerintah daerah, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa [1]. Kebijakan ini memberikan ruang besar bagi pemerintah desa untuk merancang arah pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal serta memperkuat daya saing dan kemandirian desa.

Dalam otonomi desa, kapasitas pemerintah desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi lokal merupakan faktor determinan keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Di antara berbagai aspek yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kemampuan melakukan kapitalisasi sumber daya lokal menjadi salah satu indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana desa mampu memanfaatkan aset yang dimilikinya secara produktif. Kapitalisasi dalam konteks ini tidak semata-mata dipahami sebagai proses komersialisasi aset, melainkan sebagai upaya strategis untuk mengelola, mengembangkan, dan mengoptimalkan potensi lokal sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi desa. Melalui proses tersebut, sumber daya yang dimiliki desa dapat memberikan manfaat tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat [2].

Sejalan dengan pandangan tersebut, Heller (2013) dalam *The Birth of Capitalism* menjelaskan bahwa kapitalisasi merupakan proses transformasi sumber daya yang semula bersifat sosial maupun alami, seperti tenaga kerja, lahan, dan air, menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi dan nilai tukar. Proses transformasi tersebut tidak berlangsung secara alamiah, melainkan memerlukan intervensi negara melalui pembentukan sistem hukum yang menjamin kepastian hak kepemilikan, penyusunan kebijakan publik yang mendukung investasi, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi akumulasi modal dan pengembangan ekonomi [3].

Dari perspektif *governing* memandang pemerintah sebagai aktor sentral dalam mewujudkan tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Peran tersebut dijalankan melalui perumusan kebijakan, penegakan regulasi, pemanfaatan teknologi, serta penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan secara terintegrasi. Oleh karena itu, Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari kualitas kebijakan yang dirancang, tetapi juga dari kemampuan mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif sehingga mampu memberikan solusi atas kebutuhan dan permasalahan masyarakat [4].

Berangkat dari pemahaman tersebut, sumber daya air merupakan salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar untuk dikapitalisasi dalam kerangka pembangunan desa. Air tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sumber daya alam yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai aset yang dapat dikelola secara produktif melalui kebijakan dan tata kelola yang tepat untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan kelembagaan [5]. Indonesia memiliki potensi ketersediaan sumber daya air sekitar 3,9 miliar meter kubik per tahun. Meskipun demikian, ketersediaan air bersih terus mengalami tekanan akibat meningkatnya konsumsi air yang tumbuh secara eksponensial, sementara kualitas dan kuantitas sumber daya air cenderung menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh eksploitasi sumber daya air yang berlebihan, kerusakan lingkungan, serta pencemaran yang diperkirakan mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air bersih sebesar 15–35% per kapita per tahun [6].

Sebagaimana dijelaskan dalam teori *common-pool resources* air sebagai sumber daya bersama memiliki karakteristik sulit untuk mengeksklusi pengguna (*non-excludable*) tetapi bersifat rival dalam pemanfaatannya (*subtractable*), sehingga berisiko mengalami eksploitasi berlebihan jika tidak dikelola dengan kelembagaan yang kuat. Ostrom menegaskan bahwa kegagalan pengelolaan sumber daya bersama bukanlah takdir, melainkan akibat lemahnya aturan, ketiadaan partisipasi pengguna, dan tidak adanya mekanisme pengawasan kolektif [7].

Desa Ponggok, yang secara administratif berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, merupakan salah satu kasus keberhasilan transformasi pengelolaan sumber daya air di tingkat desa yang paling menarik untuk dikaji. Pada periode sebelum tahun 2007, desa ini tercatat sebagai salah satu desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Polanharjo, di mana mayoritas masyarakat bergantung pada sektor pertanian yang sangat rentan terhadap perubahan musim dan keterbatasan akses terhadap modal serta teknologi. Namun, melalui perubahan pendekatan dalam pengelolaan sumber daya air yang dimiliki, desa ini berhasil keluar dari kondisi keterpurukan ekonomi dan bertransformasi menjadi desa mandiri yang diakui secara luas sebagai percontohan dalam pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat [8].

Berdasarkan uraian tersebut, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dan mengkapitalisasi potensi lokal melalui tata kelola yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Desa Ponggok menunjukkan bahwa sumber daya air dapat ditransformasikan menjadi aset strategis yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga memperkuat kelembagaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan mewujudkan kemandirian desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses kapitalisasi sumber daya air dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ponggok serta bagaimana tata kelola yang diterapkan berkontribusi terhadap terwujudnya kemandirian desa.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan rancangan deskriptif untuk mengkaji proses kapitalisasi sumber daya air dalam mendorong kemandirian Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Lokasi penelitian dipilih secara purposive dengan pertimbangan keberhasilan desa tersebut mengelola potensi air melalui BUMDes Tirta Mandiri. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang mencakup perangkat desa, pengurus BUMDes dan Pokdarwis, ketua Pokja, pengelola wisata, serta pelaku UMKM, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen RPJMDes, APBDes, profil desa, laporan PADes, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan [9]. Untuk menjamin validitas temuan, dilakukan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

Hasil dan Pembahasan

A. Kapitalisasi Sumber Daya Air sebagai Strategi Tata Kelola Desa

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kapitalisasi sumber daya air di Desa Ponggok tidak dimulai dari pembangunan infrastruktur fisik, melainkan dari perubahan fundamental dalam orientasi tata kelola pemerintahan desa. Sebelum tahun 2007, pemanfaatan mata air di wilayah ini masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan domestik dan irigasi pertanian, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian desa tergolong minimal dan belum mampu mengangkat desa dari statusnya sebagai kawasan tertinggal di Kecamatan Polanharjo. Kondisi ini mencerminkan sebuah kontradiksi yang menarik: Desa Ponggok dikaruniai sumber daya air yang melimpah, tetapi justru menjadi desa termiskin di Kecamatan Polanharjo. Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan Sugeng Raharjo selaku Kepala Dusun 1 Desa Ponggok sebagai berikut.

“Kami melihat sendiri bahwa air di Ponggok melimpah, umbul di mana-mana tetapi anehnya, Desa Ponggok justru menjadi desa termiskin di Kecamatan Polanharjo. Kami bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Sumber daya ada, tetapi masyarakatnya tetap miskin. Itu adalah keganjilan yang tidak bisa kami biarkan. Dari sinilah kami mulai berpikir kekayaan alam tanpa pengelolaan yang baik hanyalah potensi yang terbuang. Kami harus mengubah cara kami melihat air bukan hanya sekadar untuk kebutuhan, tetapi sebagai aset yang bisa dikelola untuk kesejahteraan bersama.” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Perubahan paradigma dari pengelolaan sumber daya air di Desa Ponggok berawal dari perubahan cara pandang pemerintah desa terhadap potensi mata air yang dimilikinya. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Junaedi Mulyono yang mulai menjabat pada tahun 2006, air tidak lagi diposisikan sekadar sebagai sumber pemenuhan kebutuhan domestik, melainkan sebagai aset strategis yang memerlukan pengelolaan terencana, produktif, dan berorientasi keberlanjutan. Orientasi baru ini diwujudkan melalui pengambilan keputusan penting untuk tidak menyerahkan pengelolaan umbul kepada investor eksternal, melainkan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri pada tahun 2009 sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola potensi sumber daya air secara mandiri.

Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kapitalisasi sumber daya air tidak semata-mata ditentukan oleh melimpahnya potensi alam, melainkan oleh kapasitas pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkuat kelembagaan, dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mengelola aset desa secara profesional. Keberadaan BUMDes Tirta Mandiri menjadi instrumen kelembagaan yang mengubah pola pengelolaan sumber daya air dari kondisi yang sebelumnya belum terorganisasi menjadi sistem yang dilengkapi dengan aturan, pembagian peran, dan mekanisme pengelolaan yang jelas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kelembagaan berfungsi sebagai prasyarat fundamental agar sumber daya bersama dapat menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas [10].

Temuan ini memperkuat teori common-pool resources bahwa sumber daya bersama tidak selalu berakhir pada eksploitasi berlebihan sebagaimana diperingatkan melalui konsep tragedy of the commons [11]. Desa Ponggok membuktikan bahwa melalui pembentukan aturan, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan aktif masyarakat, sumber daya air dapat dikelola secara kolektif tanpa mengurangi keberlanjutan fungsi ekologisnya.

Di samping penguatan kelembagaan internal, pemerintah desa juga secara aktif membangun kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui program KKN Tematik pada periode 2013–2015. Kolaborasi ini menghasilkan pemetaan potensi sumber daya air, analisis debit air, serta rekomendasi pengelolaan berbasis data ilmiah yang menjadi landasan penyusunan kebijakan desa. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Triyono selaku Ketua Pokdarwis:

“Kami tidak bisa mengandalkan semangat saja. Kami butuh data dan ilmu untuk mengelola sumber daya air dengan benar. Maka, kami menggandeng UGM. Mereka membantu kami melakukan penelitian, memetakan potensi, dan menganalisis debit air. Hasilnya, kami jadi tahu seberapa besar air yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan. Ilmu dari kampus itu menjadi dasar bagi semua keputusan yang kami ambil.” (Wawancara, 6 Oktober 2025)

Di samping penguatan jejaring dengan institusi akademik, Pemerintah Desa Ponggok juga mengembangkan kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui kerja sama dengan PT Tirta Investama Klaten (AQUA), yang memanfaatkan mata air Sigedang sebagai sumber bahan baku produksi air minum dalam kemasan. Kemitraan yang telah berlangsung

sejak masa kepemimpinan Kepala Desa Sunarta tidak hanya sekadar mengatur akses pemanfaatan sumber daya air, melainkan juga merumuskan mekanisme distribusi manfaat yang terstruktur melalui tiga instrumen utama: skema tukar guling lahan yang memperluas aset desa dari 1,147 hektare menjadi 3,955 hektare; kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 40 persen dari total karyawan; serta kontribusi pendapatan desa yang dihitung berdasarkan volume penjualan produk. Data penelitian mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, kontribusi PT Tirta Investama terhadap Pendapatan Asli Desa mencapai Rp1.196.096.800.

Pola kemitraan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan sektor swasta tidak selalu berujung pada eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, melalui perumusan kesepakatan yang jelas, pembagian manfaat yang proporsional, serta mekanisme pengawasan yang terstruktur, kemitraan dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan nilai ekonomi sumber daya air tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan lingkungan.

Melihat dari perspektif governing, temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi regulatif melalui penyusunan aturan, tetapi juga berperan sebagai aktor yang menginisiasi perubahan, membangun kelembagaan, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan menjembatani kolaborasi antara masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Peran tersebut mencerminkan dalam konsep governing bahwa pemerintahan modern tidak lagi dipahami sebatas aktivitas administratif, melainkan sebagai proses mengarahkan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi berbagai aktor untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Dalam konteks Desa Ponggok, fungsi tersebut terlihat dari kemampuan pemerintah desa membangun sinergi antarpemangku kepentingan sehingga setiap aktor memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengelolaan sumber daya air [4]

Temuan ini mengonfirmasi bahwa proses kapitalisasi tidak terjadi secara otomatis melalui keberadaan sumber daya maupun mekanisme pasar, tetapi memerlukan intervensi kelembagaan yang mampu menciptakan kepastian, mengatur pemanfaatan sumber daya, serta menjamin keberlanjutan pengelolaannya [3]. Di Desa Ponggok, intervensi tersebut diwujudkan melalui pembentukan BUMDes, penyusunan regulasi, pengembangan kemitraan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Artinya, nilai ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya air merupakan konsekuensi dari proses institusional yang dirancang secara sadar oleh pemerintah desa, bukan semata-mata akibat keberlimpahan mata air.

B. Transformasi Sumber Daya Air Menjadi Aset Ekonomi Desa

Setelah fondasi kelembagaan terbentuk melalui BUMDes Tirta Mandiri dan jejaring kemitraan diperkuat, pemerintah Desa Ponggok mengembangkan strategi diversifikasi pemanfaatan sumber daya air sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi aset desa. Air tidak lagi dipandang semata sebagai sumber pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi dimanfaatkan secara produktif pada berbagai sektor yang saling terhubung, meliputi pariwisata, perikanan, pertanian, dan kerja sama dengan sektor swasta.

Di antara beragam bentuk pemanfaatan sumber daya air di Desa Ponggok, sektor pariwisata menempati posisi paling strategis sekaligus memberikan kontribusi ekonomi terbesar bagi desa. Transformasi umbul dari sekadar sumber air domestik menjadi destinasi wisata unggulan tidak hanya mengubah fungsi fisik mata air, tetapi juga menjadi motor penggerak utama perubahan struktur ekonomi desa secara fundamental. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Laskar Rahmattullah selaku perangkat desa

"Perubahan terbesar terjadi ketika kami mulai melihat potensi wisata dari mata air yang kami miliki. Dulu, umbul-umbul ini hanya kami biarkan begitu saja, hanya digunakan untuk mandi dan mencuci. Tapi sejak tahun 2009, kami mulai mengembangkan wisata air. Sekarang ada Umbul Ponggok, Umbul Besuki, Umbul Sighedhang-Kapilaler yang sudah dikenal wisatawan, bahkan sampai mancanegara" (Wawancara, 28 Agustus 2026)

Pengembangan pariwisata air di Desa Ponggok menunjukkan bahwa kapitalisasi sumber daya alam tidak harus berarti eksploitasi besar-besaran, melainkan dapat dilakukan melalui pengembangan produk wisata yang memanfaatkan keunikan alam secara kreatif dan berkelanjutan. Sebaran destinasi wisata berbasis sumber daya air yang menjadi objek penelitian disajikan pada Gambar 1



Umbul Ponggok



Umbul Besuki



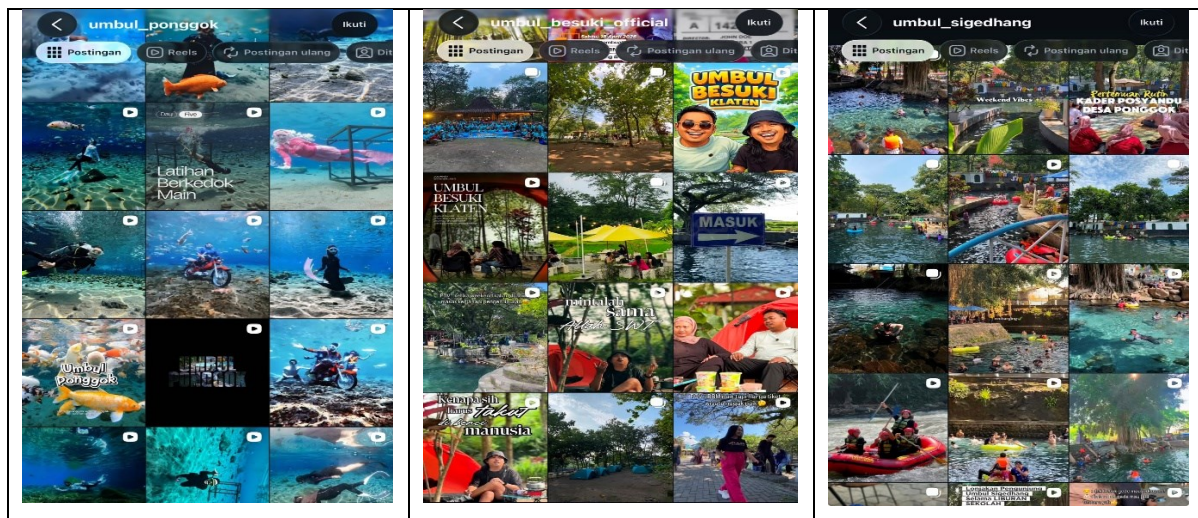
Umbul Sighedhang-Kapilaler

Gambar 1. Umbul-Umbul di Desa Ponggok

Gambar diatas memperlihatkan upaya sistematis pemerintah desa dalam mengembangkan portofolio produk wisata berbasis sumber daya air yang terdiferensiasi. Umbul Ponggok diarahkan sebagai destinasi unggulan dengan spesialisasi rekreasi air dan fotografi bawah air yang menjadi pembeda kompetitif; Umbul Besuki dikonsep sebagai kawasan wisata keluarga yang mengombinasikan rekreasi, outbound, dan edukasi; sedangkan Umbul Sigedhang-Kapilaler diposisikan sebagai destinasi wisata alam yang mengandalkan kejernihan air dan keteduhan lingkungan. Sebagaimana pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Suyantoko selaku anggota BUMDes

“Kami menawarkan beragam aktivitas, seperti berenang, snorkeling, menyelam, dan yang paling diminati adalah underwater photoshoot. Pengunjung bisa berfoto di dalam air dengan latar pemandangan bawah air yang eksotis. Kami tidak hanya mengandalkan air sebagai tempat rekreasi, tetapi juga mengembangkan kreativitas melalui aktivitas-aktivitas yang memberikan pengalaman berbeda.” (Wawancara, 28 Agustus 2025).

Informasi mengenai karakteristik masing-masing objek wisata disajikan pada Gambar 2



Gambar 2. Informasi Umbul-Umbul di Desa Ponggok

Berdasarkan gambar 2, pengembangan wisata air di Desa Ponggok juga mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi pendukung yang memperluas manfaat kapitalisasi sumber daya air. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pengunjung tidak hanya membayar tiket masuk, tetapi juga memanfaatkan berbagai layanan tambahan seperti penyewaan perlengkapan snorkeling, pelampung, ban, loker, hingga jasa dokumentasi bawah air. Sebagaimana disampaikan oleh Triyono, Ketua Pokdarwis:

“Dampak ekonomi dari pengembangan sektor wisata di Desa Ponggok sangat besar. Pada waktu kunjungan sedang tinggi, jumlah wisatawan bisa mencapai sekitar 20.000 orang dalam satu bulan. Dari penjualan tiket masuk saja, dengan harga rata-rata Rp15.000 per orang, sudah memberikan pendapatan yang cukup besar. Itu belum termasuk pendapatan dari usaha kuliner, penyewaan fasilitas, maupun atraksi wisata lainnya. Selain itu, manfaat yang paling dirasakan adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Saat ini, biaya yang kami keluarkan untuk menggaji karyawan mencapai sekitar Rp80 juta setiap bulan.” (Wawancara, 6 Oktober 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya air telah menjadi penggerak terbentuknya rantai ekonomi (*value chain*) yang melibatkan berbagai jenis usaha. Penyewaan peralatan wisata merupakan bentuk diversifikasi pendapatan yang meningkatkan nilai tambah (*value added*) dari setiap kunjungan wisatawan [12]. Sektor pariwisata memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan bagi Desa Ponggok. Sebagaimana rincian pendapatan unit wisata Umbul Besuki dan Umbul Sigedhang-Kapilaler tahun 2025 disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Hasil Pendapatan Umbul Besuki dan Umbul Sigedhang-Kapilaler

No	Akun	Unit Besuki (Rp)	Unit Sigedhang (Rp)
1	Pendapatan Tiket	1.100.000.000	1.800.000.000
2	Pendapatan Makanan	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Pendapatan Minuman	300.000.000	400.000.000
4	Pendapatan Persewaan	50.000.000	50.000.000
5	Pendapatan Parkir	130.000.000	-
6	Pendapatan Outbond	100.000.000	-
7	Pendapatan Catering	100.000.000	50.000.000
8	Pendapatan Penjualan Snack	15.000.000	30.000.000
9	Pendapatan Penjualan Perlengkapan Mandi & Makan	4.000.000	4.000.000
10	Pendapatan Lain-Lain	1.000.000	1.000.000
	Total :	2.800.000.000	3.335.000.000

Data pendapatan unit wisata tahun 2025 menunjukkan total pendapatan Umbul Besuki mencapai Rp2,80 miliar dan Umbul Sigedang-Kapilaler Rp3,35 miliar, sehingga kedua unit menghasilkan pendapatan gabungan sebesar Rp6,14 miliar. Struktur pendapatan didominasi oleh tiket masuk, makanan, dan minuman yang menghasilkan Rp5,60 miliar atau sekitar 91,28 persen dari total pendapatan gabungan, sementara Umbul Besuki memiliki sumber penerimaan lebih beragam dengan tambahan dari parkir, outbound, katering, dan persewaan. Diversifikasi ini menjadi indikator bahwa pengelolaan aset desa telah diarahkan untuk memaksimalkan potensi ekonomi sumber daya air melalui penciptaan berbagai jenis layanan yang saling mendukung.

Di samping sektor pariwisata yang menjadi andalan utama, kapitalisasi sumber daya air di Desa Ponggok juga diperkuat melalui kemitraan dengan PT Tirta Investama (AQUA). Kerja sama ini tidak terbatas pada pemanfaatan mata air sebagai bahan baku, tetapi juga mencakup kontribusi perusahaan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan di kawasan umbul-umbul. AQUA menyediakan berbagai sarana pendukung seperti tempat duduk, gapura, papan informasi, dan media promosi yang memperindah kawasan wisata, serta memberikan air minum kemasan mini kepada setiap pengunjung sebagai bentuk pelayanan. Bentuk dukungan fasilitas yang diberikan PT Tirta Investama (AQUA) terhadap kawasan wisata dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3. Fasilitas dari Pt. TIV Aqua

Keberadaan fasilitas dan pelayanan ini secara signifikan meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperkuat daya tarik destinasi. Kemitraan ini mencerminkan pendekatan kolaboratif yang saling menguntungkan: perusahaan memperoleh bahan baku berkualitas dan ruang promosi, sementara desa memperoleh dukungan fasilitas yang meningkatkan kualitas kawasan wisata dan pengalaman pengunjung, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan dan pendapatan desa.

C. Kontribusi Kapitalisasi terhadap Kemandirian Desa

Kapitalisasi sumber daya air di Desa Ponggok memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terwujudnya kemandirian desa melalui tiga dimensi utama yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, yaitu kemandirian ekonomi, kemandirian sosial, dan kemandirian tata kelola. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya air tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat serta kelembagaan desa dalam mengelola pembangunan secara berkelanjutan.

Sinergi ketiga dimensi ini menciptakan fondasi kemandirian yang kokoh, di mana peningkatan pada satu dimensi akan mendorong penguatan pada dimensi lainnya, membentuk siklus pembangunan yang berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan teori tentang *asset-based community development* yang menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berangkat dari optimalisasi aset dan potensi yang dimiliki masyarakat, bukan dari kebutuhan dan kekurangan [13].

Dampak sektor pariwisata di Desa Ponggok melampaui pendapatan langsung dari tiket masuk dan retribusi, menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang terdistribusi ke berbagai sektor ekonomi desa secara luas dan berlapis. Efek pengganda (*multiplier effect*) merupakan proses perputaran ekonomi yang terjadi akibat aktivitas pariwisata, di mana pengeluaran wisatawan tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung bagi pelaku usaha wisata, tetapi juga memicu peningkatan pendapatan sektor pendukung melalui pembelian bahan baku, penyerapan tenaga kerja, serta pengeluaran konsumsi masyarakat [14]. Perkembangan wisata telah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal di berbagai tingkatan. Generasi muda yang sebelumnya terpaksa merantau mencari pekerjaan kini dapat bekerja di sektor wisata sebagai pengelola loket, pemandu wisata, staf kebersihan, tenaga pemasaran digital, dan pengelola media sosial. Sebagaimana pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Suyantoko

“Dulu banyak anak-anak muda di Ponggok yang setelah lulus sekolah memilih merantau karena di desa belum ada pekerjaan. Setelah wisata berkembang, kondisinya berubah. Sekarang mereka bisa bekerja di desa sendiri, ada yang

menjadi petugas loket, pemandu wisata, bagian kebersihan, mengelola media sosial, sampai membantu promosi wisata secara digital.” (Wawancara, 28 Agustus 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menganalisis bahwa perkembangan sektor pariwisata di Desa Pongkok telah menciptakan multiplier effect yang nyata terhadap perekonomian masyarakat. Kapitalisasi sumber daya air tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi desa, tetapi juga membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda, sehingga mampu mengurangi ketergantungan pada pekerjaan di luar daerah. Selain itu pada aspek kemandirian sosial, kapitalisasi sumber daya air juga membuka ruang ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama kelompok ibu-ibu yang mengelola warung makan, kios minuman, serta penjualan makanan khas di kawasan wisata.

Keberadaan UMKM tersebut menjadi bukti bahwa manfaat ekonomi dari pengembangan wisata tidak hanya terkonsentrasi pada BUMDes atau Pokdarwis, tetapi turut menyebar kepada rumah tangga masyarakat. Keterlibatan berbagai kalangan ini menunjukkan bahwa kapitalisasi sumber daya air telah menciptakan inklusi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang luas. Hal ini sejalan dengan konsep *Community-Based Development* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan, karena masyarakat sebagai aktor yang secara langsung berinteraksi dengan lingkungannya memiliki pemahaman situasional yang komprehensif mengenai karakteristik ekologis, pola musim, dan dinamika sosial-ekonomi yang berlangsung di wilayahnya[15].

Sementara itu, pada aspek kemandirian tata kelola, kapitalisasi sumber daya air mendorong terbentuknya sistem pengelolaan desa yang lebih profesional melalui penguatan kelembagaan, seperti BUMDes Tirta Mandiri dan Pokdarwis Wanua Tirta. Pengelolaan aset desa dilakukan berdasarkan perencanaan yang berorientasi pada potensi lokal, didukung dengan pembagian tugas yang jelas melalui Pokja, kerja sama antarlembaga, serta mekanisme pengelolaan yang berkelanjutan. Keputusan strategis untuk tidak menyerahkan pengelolaan umbul kepada investor eksternal dan membentuk BUMDes sendiri mencerminkan kemandirian tata kelola desa. Kemampuan desa dalam mengelola aset dan mengembangkan berbagai inovasi berbasis sumber daya lokal menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

Dengan demikian, kapitalisasi sumber daya air di Desa Pongkok tidak hanya menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga membentuk fondasi kemandirian desa yang lebih kuat dan berkelanjutan. Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan desa dalam membiayai pembangunan secara mandiri melalui peningkatan PADes, memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan, serta mengelola aset desa secara profesional dan berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan [16]. Sinergi antara kemandirian ekonomi, sosial, dan tata kelola menunjukkan bahwa kapitalisasi sumber daya air telah menjadi strategi pembangunan berbasis potensi lokal yang mampu memperkuat kapasitas desa dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana keputusan-keputusan strategislah yang akhirnya mengubah wajah Desa Pongkok, dari desa tertinggal menjadi desa mandiri yang dikenal luas sebagai destinasi wisata air dan percontohan pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa tata kelola kapitalisasi sumber daya air di Desa Pongkok telah berhasil mendorong kemandirian desa melalui tiga dimensi utama yang saling memperkuat: ekonomi, sosial, dan tata kelola. Kapitalisasi diawali dengan perubahan paradigma kepemimpinan visioner di bawah Kepala Desa Junaedi Mulyono yang membentuk BUMDes Tirta Mandiri pada tahun 2009 sebagai lembaga pengelola aset desa, kemudian diperkuat melalui Pokdarwis Wanua Tirta dan LUPMMDes serta kolaborasi dengan akademisi (UGM) dan swasta (PT Tirta Investama). Kapitalisasi mentransformasikan mata air menjadi aset ekonomi produktif melalui diversifikasi sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan kemitraan swasta, dengan pariwisata sebagai andalan utama melalui Umbul Pongkok, Umbul Besuki, dan Umbul Sigedang-Kapilaler yang menciptakan efek berganda (multiplier effect) berupa tumbuhnya UMKM, lapangan kerja baru, pengurangan migrasi, dan pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga.

Kontribusi kapitalisasi terhadap kemandirian desa tercermin dari peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Rp80 juta menjadi miliaran rupiah per tahun; penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta penguatan kelembagaan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sinergi ketiga dimensi ini menjadikan Desa Pongkok bertransformasi dari desa tertinggal menjadi desa mandiri percontohan pengelolaan sumber daya air berbasis masyarakat, yang menegaskan bahwa tata kelola kapitalisasi sumber daya air yang efektif memerlukan sinergi antara kepemimpinan kuat, kelembagaan responsif, partisipasi masyarakat inklusif, dan komitmen terhadap keberlanjutan ekologis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Pongkok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, yang telah memberikan izin dan kemudahan akses selama proses pengumpulan data penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Wanua Tirta, serta seluruh informan yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya air di Desa Pongkok. Penelitian ini merupakan bagian dari penyelesaian

studi di Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

References

1. S. Eko et al., *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014.
2. W. Kurniasari and J. Wibowo, *Manajemen Pembiayaan dan Ekuitas*. Semarang, Indonesia: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.
3. H. Heller, *The Birth of Capitalism: A Twenty-First Century Perspective*. London, U.K.: Pluto Press, 2013.
4. F. Simangunsong and G. T. Tjahjoko, "Hajat hidup orang banyak: Jalan ketiga ilmu pemerintahan," *J. Ilmu Pemerintah*, semesta, vol. 2, no. 2, pp. 151–169, 2021, doi: 10.47431/governabilitas.v2i2.116.
5. G. A. P. Eryani, "Potensi air dan metode pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai Sowan Perancak Kabupaten Jembrana," *Paduraksa*, vol. 3, no. 1, pp. 32–41, 2014, doi: 10.22225/pd.3.1.266.32-41.
6. Kurniasih, "Prinsip keadilan hak atas air bagi generasi masa depan: Telaah public trust doctrine di Indonesia," *J. Pemulihan Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 69–86, 2023, doi: 10.30999/ph.v6i1.2956.
7. H. T. Handayani, M. Yusuf, and D. S. Putra, "Sustainable water resources management berbasis common pool resources di Desa Sumber Makmur," *J. Mhs. Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, pp. 145–160, 2026, doi: 10.25299/JMP.2025.27053.
8. F. Enggraini, N. C. Putri, Y. A. Salman, and W. Handayani, "Peran kelembagaan pemerintah desa dalam memajukan Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten," *J. Inov. Kebijakan.*, vol. 4, no. 2, pp. 71–82, 2020, doi: 10.21787/mp.4.2.2020.71-82.
9. Kusumastuti and A. M. Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang, Indonesia: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
10. H. Budiaman and D. Mulyanti, "Revitalisasi badan usaha milik desa dalam menggali potensi lokal desa," *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 9, no. 1, pp. 116–122, 2021, doi: 10.25157/justisi.v9i1.5020.
11. Ostrom, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1990.
12. Y. M. Vianney, "Analisis penerapan value chain management pada Desa Wisata Bleberan, Gunung Kidul, Yogyakarta," *J. Manag. Pelayanan Hotel*, vol. 4, no. 1, pp. 1–11, 2020, doi: 10.37484/jmph.040101.
13. Saenab, Dewi, and K. Hatimah, "Pemberdayaan perempuan nelayan berbasis aset komunitas di Kelurahan Pattingalloang, Kota Makassar," *NeoRespublica J. Ilmu Pemerintahan*, vol. 7, no. 2, pp. 390–399, 2026, doi: 10.52423/neores.v7i2.1283.
14. P. N. Pajriah, J. Sulaksana, and S. Umyati, "Dampak berganda (multiplier effect) objek wisata terhadap perekonomian masyarakat lokal," *MAHATANI J. Agribisnis*, vol. 8, no. 1, pp. 203–212, 2025, doi: 10.52434/mja.v8i1.42443.
15. R. H. Saputra, R. A. Nakeisha, V. K. Noorvita, D. Z. Ramadhani, N. D. Putri, and P. K. Wulandari, "Community-based economic development: Pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal Kota Batu melalui Wisata Milenial Glow Garden," *J. Sharia Econ.*, vol. 4, no. 2, 2025, doi: 10.46773/jse.v4i2.1929.
16. L. Krisnawati, A. Susanto, and Sutarmin, "Membangun kemandirian ekonomi desa melalui peningkatan daya saing potensi kekayaan alam perdesaan," *J. Maksipreneur Manajemen, Koperasi, dan Entrep.*, vol. 8, no. 2, p. 114, 2019, doi: 10.30588/jmp.v8i2.396.